

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam politik Islam, Sunni adalah kelompok mayoritas yang selalu memegang supremasi kekuasaan. Pemikiran politik Sunni sering dijadikan sebagai alat *legitimasi* bagi kekuasaan yang sedang berkembang di dunia Islam. Beberapa tokoh Sunni merumuskan pemikiran politik mereka yang cenderung bersifat akomodatif terhadap kekuasaan dan pro pada *status quo*. Pandangan mereka yang bersifat khalifah sentris adalah ciri umum paradigma politik Sunni.

Menurut golongan Sunni khalifah selain sebagai pemimpin pemerintahan juga sebagai pemimpin agama. Allah mengangkat untuk ummat seorang pemimpin sebagai pengganti (khalifah) nabi untuk mengamankan agama dengan disertai mandat politik. Dengan demikian seorang khalifah adalah pemimpin agama dan di lain pihak pemimpin politik.<sup>1</sup>

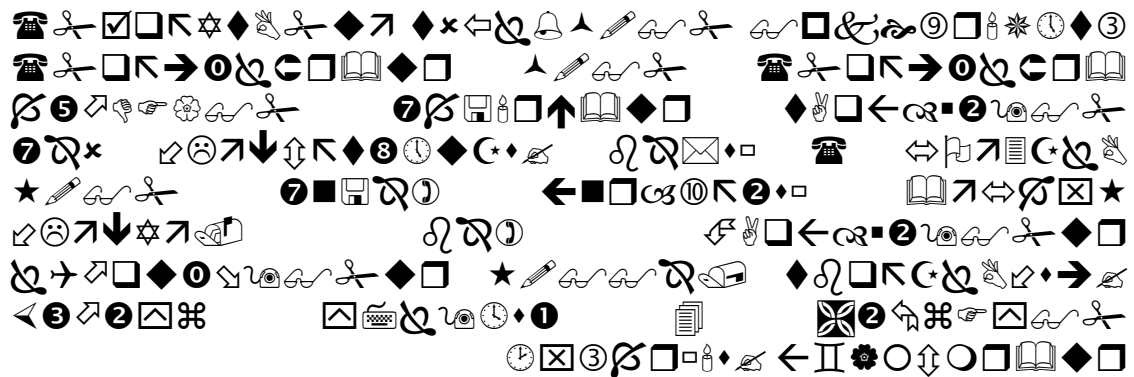
Doktrin politik Sunni ini setidaknya melahirkan paradigma *simbiosis* agama (syari'ah) dan negara (politik). Keduanya berhubungan timbal balik dan saling membutuhkan. Agama membutuhkan negara untuk mengembangkan dirinya, dan negara meniscayakan agama sebagai pembimbing etika dan moral.

---

<sup>1</sup> Akhmad Satori dan Sulaiman Kurdi, *Sketsa Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: Politia Press, 2007), h. 70. Lihat juga Munawir Sjadjali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta : UI-Press, 1993), h. 63.

Imam atau khalifah bagi golongan Sunni merupakan suatu yang niscaya. Artinya, keberadaannya sangat penting dalam suatu masyarakat atau negara. Karena itu, jelasnya tanpa Imam akan timbul suasana *chaos*. Manusia menjadi tidak bermartabat, begitu juga suatu bangsa menjadi tidak berharga.<sup>2</sup>

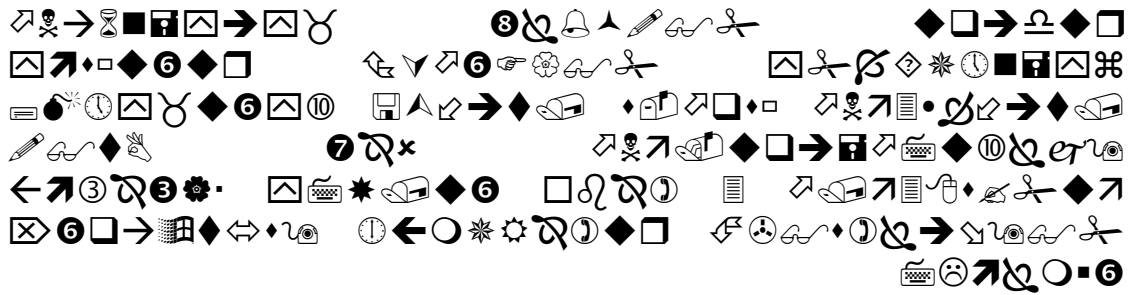
Kepala negara atau khalifah memegang peranan penting dan memiliki kekuasaan yang sangat luas. Rakyat dituntut mematuhi kepala negara, bahkan di kalangan sebagian pemikir sunni kadang-kadang sangat berlebihan. Biasanya mereka mencari dasar legitimasi keistimewaan kepala negara atas rakyatnya pada Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Diantaranya yang mereka jadikan landasan adalah Surat al-Nisa, 4:59.



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa, 59).

<sup>2</sup> Ibid. h. 71.

Dalam ayat al-Qur'an tersebut umat Islam diperintahkan untuk patuh kepada Allah, Rasul-Nya dan *Ulu al-Amr* di antara mereka. Selain itu juga surat al-An'am, 6:165.



Artinya : Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-An'am, 165)

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah-Nya di bumi dan melebihkannya sebagian atas yang lain.

Dalam konteks keindonesiaan, doktrin politik Sunni juga sering menjadi landasan bagi kekuasaan dan memberi implikasi terhadap praktik politik umat Islam Indonesia. Tidak jarang pula pelaku politik Islam Indonesia, disadari atau tidak, mendasarkan perilaku politik mereka pada paradigma Sunni. Umat Islam Indonesia yang mayoritas menganut paham Sunni (*Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*) juga tidak bisa melepaskan diri dari paradigma politik Sunni yang dikembangkan pada abad klasik tersebut. Berhadapan dengan kekuasaan, umat Islam Indonesia umumnya cenderung bersikap akomodatif dan mengutamakan keharmonisan sosial.

Setelah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, ketika Indonesia memasuki era Demokrasi Terpimpin, sebenarnya Presiden Soekarno telah jauh menyeleweng dan

menyimpang dari aturan main ketatanegaraan yang sudah digariskan bersama. Banyak tindakan-tindakan Soekarno yang *inkonstitusional*, namun umat Islam merasa mendapat perlindungan dari Soekarno. Kalangan Islam kelihatannya tidak mau bersikap *frontal* terhadap Soekarno.

Nahdatul Ulama (NU) misalnya, sebagai ormas Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah* di Indonesia yang ketika itu dalam perjalanannya menjadi partai politik pada periode Demokrasi Terpimpin tampil sebagai *partner* pemerintah dalam pembangunan politik nasional, dengan harapan mendapatkan kedudukan politik tertentu. Untuk mempertahankan alokasi itu, tak jarang NU melangkah terlalu jauh, kesediaan NU untuk menerima Nasakom, merupakan indikasi betapa organisasi ini berusaha keras untuk dapat tetap menjadi *partner* pemerintah. Dan, karenanya tetap mendapatkan alokasi kekuasaan dalam struktur pemerintahan.<sup>3</sup>

Paradigma "enam puluh tahun berada di bawah kekuasaan pemimpin yang zalim lebih baik daripada tidak punya pemimpin meskipun hanya semalam" seperti dirumuskan oleh Ibn Taimiyah dan larangan bersikap oposisi mendominasi perilaku politik Islam ketika itu.

Setelah jatuhnya Soekarno dan munculnya Orde Baru dengan Soeharto sebagai kepala negara, paradigma politik Sunni juga memainkan peranan penting dalam hubungan antara Islam dan kekuasaan. Namun, berbeda dengan masa Orde Lama, pada masa Orde Baru paradigma politik Sunni ini dijalankan dengan format yang lebih

---

<sup>3</sup> Fachry Ali dan Bahtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru Islam*, (Bandung, Penerbit Mizan, 1986), h. 92.

elegan dan *sophisticated*. Pengalaman masa lalu, ketika umat Islam mengalami kegagalan dalam politik, membuat pelaku dan pemikir politik muslim Indonesia merumuskan kembali pola baru yang saling menguntungkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dalam rangka memberi sumbangan Islam bagi bangunan negara Indonesia.

Dalam kamus politik NU sendiri, tidak ada kata *bughat* (memberontak). Jika NU menganggap pemerintah melakukan kesalahan, cara memperbaikinya adalah menegurnya dengan cara yang baik dan mengajak berdialog sebagai perwujudan *wajadilhum billati hiya ahsan* (mengajak kepada kebaikan dengan cara sebaik mungkin).<sup>4</sup> Ada kesan bahwa umat Islam khawatir kalau tidak "merapat" dengan kekuasaan, sehingga mereka mendukung kekuasaan yang sedang mapan.

Berdasarkan permasalahan di atas inilah yang melatar belakangi penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dengan garis besar penelitian bagaimana implikasi doktrin politik Sunni klasik dalam praktik politik Islam di Indonesia, apakah memberi pengaruh yang signifikan atau tidak, dan kemudian menuangkannya menjadi sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“DOKTRIN POLITIK SUNNI KLASIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP POLITIK ISLAM DI INDONESIA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>4</sup> Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), h. 220. mengutip K.H. Ahmad Siddiq, *Khittah Nahdliyah*, (Surabaya : Balai Buku, 1980), h. 62-63.

Setelah memperhatikan problematika yang akan muncul sekitar topik yang menjadi kajian penelitian ini, sangat mustahil akan terjawab semuanya, karena terbatasnya waktu dan kemampuan baik teoritis maupun teknis. Karena itu, fokus khusus penelitian ini adalah masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa yang melatar belakangi munculnya pemikiran politik ulama Sunni klasik dalam merespons situasi sosial politik pada masa itu ?
2. Bagaimana implikasi doktrin politik Sunni klasik terhadap politik Islam di Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

1. Mengetahui apa yang menjadi latar belakang pemikiran politik ulama Sunni klasik dalam merespons situasi sosial politik pada masa itu;
2. Mengetahui implikasi dari doktrin politik Sunni klasik terhadap politik Islam di Indonesia khususnya pada masa Orde Baru.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan hasil sebagai berikut :

1. Dapat menjadi masukan bagi pelaku politik Islam dalam perilaku politik mereka agar dapat menggunakan strategi-strategi yang tepat dalam menginternalisasikan nilai-nilai Islam.
2. Bagi pemegang kekuasaan, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pertimbangan bahwa Islam bukanlah sesuatu yang menakutkan. Sebaliknya Islam dapat digunakan sebagai pengarah bagi pelaksanaan kekuasaan yang sedang mereka genggam.
3. Bahan masukan dan kontribusi pemikiran bagi pemerhati masalah politik Islam di Indonesia.
4. Sebagai kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin umumnya dan khususnya perpustakaan Fakultas Syariah.

#### **E. Definisi Operasional dan Lingkup Pembahasan**

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan terlalu luas, maka penulis memandang perlu untuk memberikan definisi operasional agar para pembaca mengetahui maksud dan sasaran yang menjadi pembahasan penelitian, yakni sebagai berikut :

1. Doktrin adalah ajaran tentang asas aliran politik atau keagamaan; pendirian segolongan ahli ilmu secara bersistem.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Umi Chulsum, Winda Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya, Kashiko, 2006), h. 200.

2. Sunni adalah adalah kata sifat dari istilah arab *sunnah*, kebiasaan nabi. Disebut juga *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* atau *Ahlul-Sunnah wal Jama'ah* (Bahasa Arab: *أهل السنة والجماعة*) atau lebih sering disingkat *Ahlul-Sunnah* (bahasa Arab: *أهل السنة*). Sunni sebagai kelompok terbesar dalam Islam, sering disebut sebagai “ortodoks”, yang mengakui empat khalifah pertama dalam Islam, tidak menekankan fungsi agama dan politik Islam secara khusus terhadap keturunan anak dan menantu Nabi, yakni Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, dan mengikuti satu diantara empat mazhab fiqh.<sup>6</sup> Sekitar 90% umat Muslim sedunia merupakan kaum Sunni, dan sekitar 10% menganut aliran Syi'ah.<sup>7</sup>
3. Klasik adalah fase pemikiran pasca Rasulullah wafat sampai kepada fase sebelum adanya persinggungan dengan pemikiran modern Barat.<sup>8</sup> Masa klasik ditandai dengan masa yang identik menjaga tradisi sunnah nabi dan menghindarkannya dari pemikiran-pemikiran baru yang datang. Sedangkan modern dipahami sebagai masa pembaruan pemikiran dalam tubuh Islam yang terjadi saat persentuhan Islam dengan barat, sehingga corak pemikiran yang lahir dari *rennesains* di Eropa menginspirasi pemikir-pemikir muslim untuk

---

<sup>6</sup> Cyril Glase, *Ensiklopedi Islam Ringkas*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Perkasa, 2002), h. 377.

<sup>7</sup> Wikipedia, “Ensiklopedi Bebas”, [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), diakses tanggal 19 Maret 2009.

<sup>8</sup> Syaifudin Kudsy, “Tema Sentral Politik Islam Pramodern Dan Beberapa Kecenderungannya”, <http://lapmijaksel.blogspot.com/2008/11/tema-sentral-politik-islam-pramodern.html>. diakses tanggal 19 Maret 2009.



mengejawantahkannya dalam berbagai pemikiran para pemikir muslim kemudian.<sup>9</sup>

Untuk itulah nama-nama seperti Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, Ibn Khladun dan Al-Farabi bisa kita rujuk untuk mengetahui tema-tema sentral politik Islam klasik masa atau pramodern.

4. Implikasi adalah keterlibatan; mempunyai hubungan keterlibatan.<sup>10</sup>

Adapun yang penulis maksudkan dari judul penelitian ini yaitu “Doktrin Politik Sunni Klasik dan Implikasi Terhadap Politik Islam di Indonesia” adalah bagaimana implikasi atau pengaruh doktrin (pemikiran) politik ulama Sunni klasik yang dikembangkan pada masa itu dalam kaitannya dengan politik Islam di Indonesia khususnya pada masa Orde Baru, apakah memberi pengaruh yang signifikan atau tidak.

Sebenarnya nama-nama pemikir Sunni pada periode klasik seperti Abu al-Hasan al-Mawardi, Abu Hamid al-Ghazali, Taqiyuddin Ahmad Ibn Taimiyah, Ibn Khladun dan Al-Farabi, bisa kita rujuk untuk mengetahui tema-tema sentral politik Islam klasik atau pramodern. Namun masalah yang diteliti penulis batasi pada pemikiran tiga pemikir politik Islam Sunni klasik, yaitu Abu al-Hasan al-Mawardi (975-1058), Abu Hamid al-Ghazali (1058-1111) dan Taqiyuddin Ahmad Ibn Taimiyah (1263-1329). Selain mereka bertiga dianggap sebagai pionir pemikir politik Sunni yang merumuskan landasan politik Islam dan paling berpengaruh bagi kalangan

---

<sup>9</sup> Sigit Bayu Aji, “Pemikiran Islam Modern”, <http://windraider.multiply.com/journal/item/3>, diakses tanggal 09 Januari 2010.

<sup>10</sup> Umi Chulsum, Winda Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *op.cit.*, h. 298.

muslim Sunni, tokoh-tokoh tersebut juga berperan besar dalam merumuskan hubungan yang akomodatif antara Islam dan kekuasaan. Disamping itu juga referensi yang ditemukan penulis lebih banyak pada tiga tokoh tersebut. Periode dalam penelitian inipun penulis batasi dengan penekanan pada masa Orde Baru, pilihan pengambilan periode Orde Baru ini didasarkan dengan lamanya kekuasaan rezim Orde Baru selama 32 tahun para pelaku politik dan tokoh-tokoh Islam di Indonesia terlihat pro dan bersikap akomodatif terhadap kekuasaan, disamping itu juga agar lebih terarah dan fokusnya penelitian ini.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*). Yaitu penelitian dengan mempelajari serta menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

### **2. Subyek dan Objek penelitian**

Yang menjadi subyek penelitian ini adalah sejumlah literatur-literatur yang membahas tentang objek yang akan diteliti yaitu mengenai pemikiran beberapa pemikir politik Islam Sunni klasik, dan implikasinya terhadap politik Islam di Indonesia.

### **3. Data**

Data yang digunakan dalam penelitian idealnya terbagi pada dua bagian yaitu data primer, dan data sekunder. Namun karena keterbatasan penulis untuk

menemukan dan memahami data primer, maka penulis hanya menggunakan data sekunder dari para penulis yang khusus meneliti juga menterjemahkan kitab-kitab karangan al-Mawardi, al-Ghazali, dan Ibn Taimiyah. Selain itu untuk membantu memahami kedua data tersebut digunakan data tertier dari kamus dan ensiklopedi.

a. Data Sekunder

1. Pedoman Islam Bernegara Terjemah *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlahi al-Ra'i wa al-Ra'iyah* oleh K.H Firdaus AN.
2. Al-Ghazali oleh H.M.K Bakry.
3. Bedah Al-Ahkamus Sulthaniyah Al-Mawardi oleh Nur Mufid dan A. Nur Fuad.
4. Merambah Jalan Baru Islam, Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru oleh Fachry Ali dan Bahtiar Effendi.
5. Islam dan Politik Era Orde Baru oleh Din Syamsuddin.
6. Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini oleh Anthony Black.
7. Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru oleh Abdul Aziz Thaba.
8. Politik Kenegaraan Pemikiran-Pemikiran Al-Ghazali dan Ibn Taimiyah oleh Jeje Abdul Rojak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survey dokumen atau kepustakaan dengan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan guna melakukan seleksi awal terhadap literatur-literatur yang mendukung pembuatan karya ilmiah ini, selain dengan metode survey kepustakaan pengumpulan data juga dilakukan dengan metode telaah pustaka yakni dengan menelaah literatur-literatur yang memuat data yang diinginkan.

#### 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi untuk menghindari data yang tidak diperlukan, setelah itu diklasifikasikan secara tematik untuk memudahkan deskripsi dan interpretasi data. Data-data penelitian akan diinterpretasikan dengan perspektif sejarah (*historical approach*), tepatnya sejarah intelektual. Penggunaan pendekatan sejarah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pemikiran politik Sunni klasik dan latar belakang sosial politik yang ikut berpengaruh dalam pembentukan pemikiran tersebut.

Dalam hal ini peneliti melacak karya-karya pemikir politik Islam Sunni klasik untuk mendapatkan gambaran tentang gagasan-gagasan mereka berhadapan dengan kekuasaan. Dari sini dirumuskan ciri dan kecenderungan umum politik Islam Sunni klasik. Pemikiran mereka selanjutnya dijadikan sebagai kerangka atau alat untuk melihat evolusi pemikiran politik Islam Sunni di Indonesia

khususnya pada masa Orde Baru. Dengan demikian, selain studi literatur, penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis-empirik. Dari pendekatan ini akan dijawab apakah pemikiran politik Sunni klasik memberi implikasi dan pengaruh dalam perilaku politik Islam di Indonesia.

### **G. Kajian Pustaka**

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap sejumlah artikel, makalah yang dipresentasikan dalam forum ilmiah, maupun hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk skripsi, akhirnya peneliti menemui ada beberapa kepustakaan yang memiliki kemiripan terkait masalah yang akan peneliti angkat dalam skripsi ini, antara lain : skripsi Riani Maulida (2007), Hikmah (2006), dan Siti Aisyah (2006).

Riani Maulida dalam skripsi yang berjudul “Tugas Kepala Negara Menurut Fiqih Siyasa (Studi Pemikiran al-Mawardi)” menyimpulkan bahwa konsep kepala negara menurut pemikiran politik al-Mawardi adalah khalifah yang mempunyai tugas antara lain menjaga agama agar tetap diatas pokoknya yang terus menerus dan sesuai pemahaman yang disepakati oleh generasi salaf umat Islam, menjalankan hukum, menjaga keamanan, dan berjihad melawan pihak yang menentang Islam.

Kemudian Hikmah (2006) dalam penelitian skripsi yang berjudul “Pandangan Taqiyudin an-Nabhani Tentang Khalifah” memberikan kesimpulan mendirikan khalifah adalah suatu kewajiban ummat berdasarkan al-Qur’an dan Ijma yang tidak terikat oleh teritorial. Meskipun khalifah bukan pemimpin yang mengganti nabi dalam

hal agama, akan tetapi ia ditugaskan untuk menjalankan dan menerapkan syariat dan undang-undang negara dalam pemerintahannya. Wewenang khalifah diberikan secara penuh kepada khalifah untuk mengatur urusan-urusan negara dengan melalui pertimbangan musyawarah dan ijtihad khalifah sendiri.

Selanjutnya Siti Aisyah (2006) dalam skripsi dengan judul “Pandangan Imam Syafi’i Tentang Imamah”, mengungkapkan pandangan Imam Syafi’i tentang kriteria Imamah dalam Islam yaitu Imamah wajib ditegakkan di bawah kepemimpinan kaum muslimin dan merupakan kewajiban agama, serta harus dipegang oleh kaum Quraisy, namun Imamah tidak harus dari Bani Hayim saja.

Berbeda dengan penelitian yang penulis angkat dalam skripsi ini yaitu penulis lebih mengungkap tentang pemikiran-pemikiran politik ulama-ulama sunni klasik serta keadaan sosial politik saat itu yang menjadi latar belakang pemikiran tersebut, juga yang terpenting dan belum secara rinci dilakukan penelitian adalah bagaimana kemudian pemikiran ulama sunni klasik ini dijadikan sebagai tolak ukur pemikiran dan sikap politik sunni di Indonesia ketika berhadapan dengan kekuasaan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri atas empat bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub bab yang diantaranya memiliki keterkaitan yang erat satu sama lainnya, sehingga membentuk suatu uraian yang sistematis dalam satu kesatuan. Penulisan dalam skripsi ini diarahkan untuk mengkaji persoalan di seputar pemikiran Sunni klasik dan pengaruhnya terhadap politik Islam di Indonesia.

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, signifikansi penelitian, dan metode penelitian.

Dalam bab II penulis melakukan tinjauan umum tentang sunni, selanjutnya penulis mencoba memberikan gambaran tentang doktrin politik Sunni klasik dimana pada bagian ini akan diuraikan tentang Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan Ibn Taimiyah, beserta pemikiran politik ulama Sunni tersebut. Juga pada bagian ini akan dilakukan tinjauan tentang politik Islam di Indonesia pada masa Orde Baru.

Pada bab III penelitian ini, penulis mencoba memberikan analisis tentang apa yang melatarbelakangi pemikiran politik yang dikembangkan oleh ulama Sunni dalam menyikapi kondisi sosial politik ketika itu, dan bagaimana implikasi dari doktrin Sunni tersebut terhadap politik Islam di Indonesia pada masa Orde Baru.

Terakhir dalam bab IV merupakan penutup skripsi ini, berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran dari penulis.